

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan teori pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto, dari semua aspek mulai dari produktivitas hingga akuntabilitas yang dibahas dalam kebijakan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) terutama di wilayah kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa paparan kinerja organisasi pemerintah melalui beberapa aspek pelayanan. Pada aspek produktivitas, dalam pereleasasian pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan ini sudah baik, hanya saja masih belum efektif seluruh laporan teratasi. Hal ini disebabkan kurang optimalnya tingkat efisiensi dari kinerja yang dihasilkan, dipengaruhi oleh anggaran, sumber daya manusia hingga kualitas sarana prasarannya.

Pada aspek berikutnya yakni kualitas pelayanan, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugasnya mengelola lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih perlu ditingkatkan kembali. Terutama dalam menanggapi laporan keluhan masyarakat agar umpan balik yang diterima oleh dinas perhubungan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya terlebih lagi sebagai organisasi pelayanan publik. Untuk aspek responsivitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman masih

belum maksimal pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum maksimalnya indikator responsivitas ini terlaksana antara lain kurangnya sumber daya non manusia berupa dana untuk menanggapi keluhan seputar permasalahan lampu yang disampaikan masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan penilaian yang rendah untuk respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan.

Sedangkan pada aspek tanggung jawab kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah cukup baik, dapat dilihat bagaimana Dinas Perhubungan memproses setiap laporan keluhan yang diajukan masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang dibangun oleh Dinas Perhubungan sudah baik karena SOP yang dibentuk telah dijalankan sedemikian rupa dan menunjukkan kinerja yang dimiliki instansi sudah cukup baik. Dan pada aspek yang terakhir yakni akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik terutama dalam mengelola lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Meskipun anggaran terbatas tetapi tetap memprioritaskan pelayanan untuk menjaga akuntabilitas publik. Langkah ini memang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, tetapi ini menunjukkan bahwa ada keterbukaan dalam menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran.



## 6.2 Saran

Dari paparan kesimpulan di atas mengenai kebijakan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam mengelola lampu yang bermasalah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada jumlah tenaga yang dimiliki agar proses pengelolaan jauh lebih efisien
2. Mengoptimalkan penyusunan skala prioritas program serta mengajukan penambahan alokasi anggaran pada APBD sesuai data kebutuhan di lapangan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja, khususnya pada pengelolaan dan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
4. Meningkatkan ketiga poin pokok permasalahan di atas untuk memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan agar lebih efektif.

